

**MODEL DESA MANDIRI BERBASIS EKONOMI SYARIAH DI JAWA TIMUR -  
INDONESIA**

**Ma'ruf Sya'ban, Fatkur Huda, Arin Setiyowati**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surabaya

Islamic Banking, Faculty of Islamic Studies Universitas  
Muhammadiyah Surabaya

---

**ABSTRACT**

The Sharia economic system has experienced quite good growth and development in Indonesia, this is marked by the rise of Islamic financial institutions and non-bank institutions. Sharia Economic Discourse has become an intensive discussion at seminars and workshops in order to formulate the ideal type of sharia economy. In this regard, Bank Indonesia in collaboration with the Association of Islamic Economics Experts conducted a Sharia-based Independent Village Development Program in East Java. There are several villages used as project pilots in this program, one of them is Cukir Village, Jombang Regency. This research uses a qualitative approach that is a research strategy and technique used to understand the community by gathering as many in-depth facts as possible, and presented in verbal form. The results of this study are the translation of five indicators set by Bank Indonesia related to the assessment of the sharia-based independent village. By translating into the concepts referred to from several references, the concept of an independent village based on sharia economics is found which has an activity value based on sharia principles.

**Keywords** : *Independent Village; Sharia Village; Islamic Economics*

**Correspondence to** : [hudafatkur@gmail.com](mailto:hudafatkur@gmail.com)

**ABSTRAK**

Sistem ekonomi Syariah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup baik di Indonesia, hal ini ditandai dengan maraknya lembaga keuangan syariah maupun lembaga non bank. Wacana Ekonomi Syariah telah menjadi dirkus yang intensif pada seminar, lokakarya dan workshop guna merumuskan tipe yang ideal ekonomi syariah. Dalam hal ini Bank Indonesia (BI) berkerjasama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) melakukan program Pengembangan Desa Mandiri Berbasis Ekonomi Syariah di Jawa Timur. Ada beberapa desa yang dijadikan sebagai pilot proyek dalam program ini, salah satunya adalah Desa Cukir Kabupaten Jombang. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu strategi dan teknik penelitian yang digunakan untuk memahami masyarakat dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta mendalam, dan disajikan dalam bentuk verbal. Hasil dari penelitian ini adalah penerjemahan 5 (lima) indikator yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) terkait penilaian desa mandiri berbasis ekonomi syariah tersebut. Dengan penerjemahan kedalam konsep yang dirujuk dari beberapa refrensi maka ditemukan konsep desa mandiri berbasis ekonomi syariah yang memiliki nilai aktifitas berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

**Kata Kunci** : *Desa Mandiri, Desa Syariah, Ekonomi Syariah*

**Korespondensi** : [hudafatkur@gmail.com](mailto:hudafatkur@gmail.com)

## PENDAHULUAN / INTRODUCTION

Desa sebagai sebuah entitas penting pada pemerintahan di Indonesia, sebagai suatu lingkup terkecil dalam pemerintahan namun desa seringkali diabaikan dalam proses pembangunan. Kita harus mengakui secara empiris bahwa pembangunan desa jauh tertinggal dibandingkan kota, hingga penyematan status suatu kondisi yang negative ada pada desa, mulai dari buruknya infrastruktur, rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana umum, hingga pada persoalan pelayanan public. Dalam hal kemasyarakatan orang desa sering disudutkan pada status kemiskinan, pendidikan rendah, pengangguran, kurang produktif dan status social yang serba kurang menguntungkan lainnya. Pada aspek perekonomian dan Pendidikan di daerah pedesaan tidaklah semeriah di wilayah perkotaan (Latief, 2012). Oleh karena itu perlu adanya sebuah pengembangan desa dalam rangka mengejar ketertinggalan selama ini. Pengembangan desa adalah satu bagian kegiatan yang menjadi penting dalam kondisi saat ini, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa desa dan masyarakatnya masih berada pada kondisi serba kekurangan dan tertinggal dibanding kondisi masyarakat kota diberbagai aspek kehidupan, khususnya sosial dan ekonomi. Kesenjangan antara desa dan kota adalah suatu kenyataan bahwa kemiskinan masih membelenggu sebagian warga masyarakat di negeri ini.

Masalah kemiskinan menjadi persoalan yang mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah karena terbilang cukup sulit untuk mengatasinya. Adakalanya suatu kemiskinan harus benar-benar terjadi karena adanya suatu keadaan yang memaksa seseorang untuk berada pada posisi tersebut, misalnya krisis ekonomi, gaya hidup dan budaya yang justru mengakibatkan masyarakat Indonesia itu menjadi miskin. Hal tersebut diperparah dengan banyaknya rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan (Prihartini Budi Astuti, 2014). Garis kemiskinan didasarkan pada pendapatan mempertimbangkan pada dimensi kesejahteraan. Namun ukuran ini justru tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Pasalnya, banyak orang yang

mungkin tidak tergolong miskin dari segi pendapatan dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serata redahnya indikator-indikator pembangunan manusia. Selain itu, perbedaan antar daerah juga merupakan ciri kemiskinan, diantaranya tercermin dengan adanya perbedaan anantara daerah pedesaan dan perkotaan (Intan Mala Sari & Abdullah, 2017).

Adanya anggapan bahwa pembangunan nasional justru menciptakan kesenjangan antara desa dan kota. Pembangunan yang bias perkotaan semakin memperbesar *disparitas* antara kota dan desa. Permasalahan yang terjadi di Indonesia sesuai fakta yang ada bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah, ini bukti terjadi *disparitas* pendapatan antar daerah dan tinginya tingkat kemiskinan (Pujimulyatama, 2014). Indonesia yang lebih mengonsentrasikan pembangunan ekonomi pada sektor industri untuk mengejar pertumbuhan. Akibatnya, sektor lain seperti sektor pertanian yang berada di pedesaan dan menjadi mata pencaharian utama masyarakat desa dikorbankan. Konsekuensinya, pembangunan hanya terpusat di kota dan kepentingan masyarakat desa dikesampingkan (Didik G. Suharto, 2016). Meskipun melalui pembangunan desa telah beberapa saat tetapi masih ada masalah yang dihadapi oleh desa dan membutuhkan penyelesaian segera sampai sekarang, seperti isu rendah sebagai kemampuan sumber daya manusia, administrasi yang tidak sejajar (Ramly, 2019).

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sukmaniar (Sukmaniar, 2007) tentang efektifitas pemberdayaan masyarakat melalui program Pengembangan Kecamatan dengan menggunakan Teknik analisa kuantitatif dan kualitatif yang menganalisa tingkat kondisi pemberdayaan masyarakat pasca Tsunami, hasilnya menunjukkan indicator tidak efektifnya pemberdayaan masyarakat tersebut, maka perlu adanya proses penyiapan masyarakat secara matang dan memilah kondisi sosio ekonomi masyarakat yang sudah memiliki kemandirian. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Syafar Supardjan (Syafar Supardjan, 2012) tentang Pemberdayaan Masyarakat pada Program Pembiayaan Mikro (Studi Tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Mikro pada Anggota Koperasi Baytul Ikhiar, Kabupaten Bogor yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik, dengan hasil kesimpulan yang menunjukkan

berjalannya implementasi kebijakan pemerintah sehingga terjalannya program dengan baik, meskipun ada beberapa factor yang menjadi kendala adalah penyaluran yang kurang maksimal dan tingginya partisipasi. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Pera Sundarianingsih (Pera Sundarianingsih, 2014) yang melakukan Evaluasi Keberhasilan Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) dalam Menggerakkan Social Ekonomi Masyarakat Pedesaan yang dilakukan di desa Adat Pekutatan yang ditinjau dari 3 (tiga) aspek yaitu pengelolaan, kinerja keuangan dan peran LPD dalam menggerakkan social ekonomi masyarakat pedesaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan LPD desa Adat Pekutatan sudah cukup baik. Kinerja keuangan yang ditinjau dari aspek permodalan, aktiva produktif, earning, dan likuiditas. Pada aspek social ekonomi masyarakat pedesaan di desa Adat Pekutatan LPD bukanlah suatu Lembaga keuangan yang semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan/ konsep bisnis murni melainkan sebagai Lembaga pendanaan yang berjiwa social religious. Dalam penelitian Muhammad Nizar (Nizar, 2016) yang memotret model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang, menunjukkan adanya 3 model pemberdayaan melalui ZIS tersebut yakni bersifat konsumtif (tradisional dan kreatif) dan produktif (kreatif). Dari ketiga model tersebut lebih mengarah kepada gerakan menyalurkan ZIS yang pemanfaatannya langsung digunakan oleh *mustahik* dan habis dalam jangka pendek serta pendaagunaannya tidak menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan *mustahik*. Dalam studi eksplorasi yang dilakukan oleh Sofyani (Sofyani et al., 2019) menunjukkan factor-faktor keberhasilan utama yang mendorong kinerja BUMDes. Diantaranya adalah patriotisme dan gairah, keterampilan, pelatihan, tingkat Pendidikan, pengalaman, kejujuran (perilaku etis), memiliki rasa tanggung jawab, ketulusan, keseriusan, kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Ini menjadi indicator yang baik dalam rangka pemberdayaan masyarakat pedesaan. Pada aspek lain pesantren sabagai basis Pendidikan

yang berorientasi pada nilai-nilai Syariah memiliki potensi sumber daya manusia yang tepat dalam pengembangan ekonomi Syariah sebagai mana penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zuhirsyan yang mengatakan bahwa pesantren dengan kemandirianya dapat melakukan pemberdayaan pada beberapa hal seperti menjadikan pesantren sebagai laboratorium ekonomi Syariah, forum bisnis Syariah, Islamic Economy Centre serta inspirator pengembangan ekonomi berbasis Syariah (Zuhirsyan, 2018).

Mengkaji penelitian terdahulu di atas maka dalam proses pemberdayaan pedesaan perlu adanya model yang dapat menyentuh berbagai aspek dimensi, mulai dari aspek kinerja, finansial, sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktu dan berbagai aspek lain dalam konteks social ekonomi dan keagamaan. Maka dalam tinjauan aspek tersebut ekonomi Syariah hadir sebagai suatu moda transportasi pengembangan desa, sebagai suatu model pemberdayaan yang mampu melintas pada aspek social religious. Hadirnya system ekonomi syariah dalam wacana dan praksis telah berkembang luas pada kehidupan ekonomi masyarakat di Indonesia. Dalam perkembangan terkini menunjukkan bahwa ekonomi Syariah identic dengan ekonomi perkotaan, pengembangannya di pedesaan kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu pengembangannya di pedesaan menjadi sangat penting dilakukan, karena mayoritas masyarakat pedesaan di Indonesia beragama Islam (Kusmanto, 2016). Pengembangan ekonomi islam di pedesaan Indonesia berhadapan langsung dengan realitas menguatnya sitem ekonomi modern (kapitalis) dan tersisihnya system ekonomi tradisional (prakapitalis) yang memiliki nilai-nilai kearifan local. Ekonomi modern (perkotaan) membongkar prinsip-prinsip kearifan local ekonomi tradisional (pedesaan) yang berwatak produksi untuk swasembada dan sangat sedikit menjualnya ke pasar, menjadi ekonomi perdagangan mendasarkan hukum pertukaran. Petani pelaku utama ekonomi pedesaan menjadi wiraswasta (J.H. Boeke, 1983).

Gerakan social ekonomi Islam tumbuh dan berkembang melalui Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di pedesaan Indonesia khususnya Jawa Timur. Pembentukannya menjadi alternative system ekonomi bagi masyarakat pedesaan. Berbagai program dicanangkan melalui program pemberdayaan dan pengembangan desa sehingga praktik ekonomi Islam terlembaga dan menjadi

bagian keseharian masyarakat. Kondisi social, ekonomi dan politik masyarakat pedesaan menjadi factor penting, diluar factor penggerakannya. Sistem ekonomi Syariah memiliki kaitan dan akar dalam syariat, berbeda dengan system ekonomi konvensional. Ia membentuk pandangan dunia sebagai sasaran dan strategi (*Maqoshid Al-syari'ah*) yang berbeda dengan system sekuler yang sedang menguasai dunia saat ini. Ekonomi syariah tidak menekankan pada materialism, tetapi pada kebahagiaan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*) atas dasar persahabatan (*al-ukhuwah*), keadilan social ekonomi, dan pemenuhan keutuhan spiritual umat manusia. (Umer Chapra, 2000)

Praktik ekonomi Islam secara kelembagaan dan kehidupan sehari-hari di pedesaan akan tercapai secara bertahap, dalam hal ini ada tiga tahapan yang meliputi, *pertama*, tahap pengenalan (introduction), ekonomi Islam dijalankan terlebih dahulu dengan segala keterbatasan yang ada. Masyarakat mengenal secara luas tentang lembaga ekonomi Islam, yang secara prinsip berbeda dengan ekonomi konvensional, sehingga dapat menerima keberadaannya. *Kedua*, tahapan pengakuan, merupakan tahap pembuktian keunggulan komperatif ekonomi Islam dengan konvensional. Dukungan pemerintah sangat penting terutama dalam hal regulasi. *Ketiga*, tahapan pemurnian, merupakan tahap pemahaman secara mendalam dan mengerti perbedaan mendasar ekonomi Islam dengan konvensional. (Anif Punto Utomo, 2014)

## METODE PENELITIAN / METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu strategi dan teknik penelitian yang digunakan untuk memahami masyarakat, masalah atau segala dalam masyarakat dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta mendalam, data disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka. Pendekatan ini digunakan penulis dikarenakan subyek kajian penelitian tesis ini adalah mengkaji bagaimana model pengembangan desa berbasis ekonomi syariah dan memotret pelaksanaannya di Desa Syariah Cukir Kabupaten Jombang.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*literatur research*) yang selanjutnya dilakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan analisis kualitatif. Karena itu data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa pengumpulan informasi dari literatur yang mengungkap konsep model pengembangan desa dan informasi yang berbentuk keterangan-keterangan dan bukan berupa angka-angka. Analisis kualitatif dianggap lebih tepat dalam penelitian ini, sebab analisis ini diharapkan dapat lebih memungkinkan untuk mengembangkan penelitian ini agar bisa mendapatkan pemahaman mendalam.

## HASIL PENELITIAN / RESULTS

Kondisi sosial Desa Cukir merupakan desa yang menjadi pusat perdagangan dari kecamatan Diwek, yang merupakan desa dengan tipologi Perindustrian/Jasa sehingga memiliki potensi pengembangan usaha yang cukup baik; dari segi kependudukan desa ini didiami oleh dua etnik yakni Jawa 99 % dan Cina 1 % dengan 4 aliran agama yakni Islam 99.24%, Kristen 0.67%, Katholik 0.2%, dan Budha 0.1%. Kondisi ini menjadi gambaran bahwa etnik di desa tersebut adalah etnik jawa yang merupakan penduduk beragama Islam.

Pada aspek pendidikan masyarakat di Desa Syariah Cukir mencapai 72% dari total penduduk telah mendapatkan akses pendidikan dan mereka yang telah menempuh pendidikan wajib 9 tahun mencapai 50%

**Tabel Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat	%
1	Tamat SD	24 %
2	Tamat SMP	23 %
3	Tamat SMA	40 %
4	D1-D3	3 %
5	S1-S3	11%

Melihat aspek kesejahteraan sosial masyarakat Desa Syariah Cukir maka dapat dilihat pada tabel berikut:

### Masalah Kesejahteraan Sosial

No	Masalah	Jumlah/orang
1	Orang gila/stres/cacat mental	5
2	Orang cacat fisik	3
3	Anak yatim usia 0-18 tahun	15
4	Anak piatu usia 0-18 tahun	7
5	Anak yatim piatu usia 0-18 tahun	8
6	Janda	438
7	Duda	73
8	Anak remaja, preman dan pengangguran	112
9	Perempauan yang menjadi kepala keluarga	440

Pada aspek ini maka perlu adanya sebuah penanganan dalam konteks kesejahteraan keluarga, sehingga dapat ditemukannya persoalan-persoalan sosial yang menjadi persoalan pertumbuhan ekonomi keluarga. Persepsi tentang kesejahteraan keluarga terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah yang mampu memenuhi kebutuhan spritual dan kebutuhan material.

Kondisi kesejahteraan keluarga di Desa Syariah Cukir dapat digambarkan sebagai berikut:

### Kesejahteraan Keluarga

No	Kategori	Jumlah (KK)
1	Keluarga Prasejahtera	125
2	Keluarga Sejahtera 1	224
3	Keluarga Sejahtera 2	763
4	Keluarga Sejahtera 3	976
5	Keluarga Sejahtera 3+	325

Pada tabel tersebut di atas dapat dilihat pada kategori Keluarga Prasejahtera mencapai 5%. Kondisi ini menjadi gambaran masih adanya kepala keluarga yang tertinggal jauh pada aspek kesejahteraan keluarga.

Pada aspek Ekonomi dan struktur komunitas ekonomi yang umumnya penduduk desa syariah Cukir mempunyai mata pencaharian

sebagai petani dengan jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga sebesar Rp 1.750.000,00, berbeda dengan mereka yang mengelola perkebunan dengan pendapatan perkapita lebih tinggi dibandingkan mereka yang bekerja sebagai petani/buruh tani, adapun pendapatan perkapita untuk perkebunan yakni Rp 2.150.000,00.

Di sisi lain desa syariah Cukir memiliki beberapa lembaga ekonomi dalam bentuk unit usaha desa, jasa lembaga keuangan, industri kecil dan menengah dan beberapa usaha seperti lembaga ekonomi dan unit usaha desa/kelurahan, jasa lembaga keuangan, industri kecil dan menengah, usaha jasa pengangkutan dan usaha jasa perdagangan

Selain daripada potensi ekonomi yang telah dikelola oleh masyarakat, Desa Syariah Cukir sendiri memiliki sumber keuangan dalam pelaksanaan kegiatan. Merujuk pada laporan realisasi pelaksanaan APBD tahun 2017 selain dari dana desa, Cukir memiliki pendapatan hasil usaha desaUsaha desa tersebut dalam bentuk koperasi pinjaman modal usaha, adapun platfon yang diberikan mencapai Rp 5.000.000,00/ setiap usaha. Dengan margin 1 % per tahun. Dengan rata-rata lama pinjaman 1 tahun (Nilam Eka Nurcahya, 2018) dan bagi hasil pajak dan retribusi. Ini menjadi bentuk kemandirian desa dalam mengembangkan suatu usaha desa. Dana-dana tersebut selain dari pada digunakan untuk pembangunan desa, pada bidang pemberdayaan masyarakat memiliki kegiatan-kegiatan seperti bantuan kepada rumah tangga miskin dan bantuan sosial lainnya. (Pemerintah Desa Cukir, 2017)

Kondisi objektif masyarakat desa syariah Cukir yang mayoritas beragama Islam dan merupakan salah satu wilayah dengan pesantren yang cukup besar di Jawa Timur. Pesantren, sebagai sistem pendidikan pribumi yang memiliki latar budaya dan sosial, semenjak kemunculanya mudah diterima dan kemudian mengakar kuat di dalam masyarakat Indonesia.

Karena pesantren merepresentasikan pendidikan unik yang mensintesakan dimensi sosial, budaya dan agama, maka sintesis ini kemudian mempengaruhi fungsi pesantren baik secara internal maupun eksternal. Pesantren kemudian muncul sebagai sebuah komunitas yang memiliki kemampuan untuk terlibat dalam

aktivitas-aktivitas kreatif dalam pembangunan masyarakat dengan menggunakan pendidikan alternatif yang menggabungkan pendidikan dan pengajaran.

Pada aspek pengembangan pemahaman masyarakat tentang keagamaan berikut kami sajikan data pendidikan formal keagamaan:

NO	NAMA	JUMLAH	TENAGA PENGAJAR	JUMLAH SISWA/MAHASISWA
1	Sekolah Islam	4	75	1200
2	Raudhatul Athfal	4	25	544
3	Ibtidayah	4	75	1200
4	Tsanawiyah	4	75	675
5	Aliyah	5	90	1200
6	Pompes	8	80	4500

Ada potensi besar dalam melakukan pendampingan masyarakat untuk memahami bagaimana potensi pengembangan desa mandiri berbasis ekonomi syariah.

Selain daripada melalui lembaga pendidikan formal keagamaan, masyarakat Desa Syariah Cukir sendiri memiliki kegiatan yang rutin dan kental dengan gerakan kemasjidan, hal ini sebagaimana disampaikan oleh bapak sekdes bahwa masyarakat senantiasa melakukan kajian mulai dari kajian harian maupun mingguan yang dilakukan di masjid/langgar/surau/mushola (M. Sujito (Sekretaris Desa Cukir), 2018). Adapun potensi tersebut dapat dilihat dengan jumlah masjid 5 buah dan langgar/surau/mushola 34 buah.

Dalam merespon modernitas, aktivitas yang dilakukan pesantren selama ini adalah dengan mengembangkan perekonomian guna membiayai kelangsungan roda dan program kehidupan pesantren. Dengan situasi apapun pesantren, sebagai bagian dari sub kultur masyarakat, tetap eksis walaupun dengan swadaya. Kemampuan Kiai, para ustadz, santri, dan masyarakat sekitar, menjadi kunci utama untuk meneguhkan atau setidaknya meningkatkan kompetensi pesantren dalam visinya itu.

Melihat gambaran kondisi objektif desa syariah Cukir dapat kita kaitkan pada indikator yang menjadi acuan penilaian desa mandiri

berbasis ekonomi syariah berikut: *Pertama*, Sumberdaya manusia (*human capital*) menempati kedudukan dan peran yang sangat penting dalam pembangunan. Tidak saja sebagai pengelola dan pelaku pembangunan, tetapi pembangunan itu sendiri harus mampu memberikan manfaat dan perbaikan kehidupan dan kesejahteraan manusia. Itulah sebabnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi yang lebih jauh penting dari itu adalah perbaikan mutu hidup yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index*, sebagaimana yang dikenalkan oleh Mahbul-ul Haq (1996) yang kemudian dikembangkan oleh Amartya Sen sebagai penerima Hadiah Nobel Ilmu Ekonomi pada tahun 1998.

Dalam rangka mewujudkan program pengembangan desa mandiri berbasis ekonomi syariah maka perlu adanya figur kepemimpinan dan pendamping desa. Sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang desa adalah penyediaan pendamping desa yang mampu melakukan kerja-kerja pemberdayaan di masyarakat. Pendamping desa akan menentukan sejauh mana transformasi dari desa lama menjadi desa baru sesuai Undang-undang Desa tersebut sukses.

Sedangkan Kondisi sosial ekonomi masyarakat secara sosiologis merupakan bagian integral dari hubungan-hubungan sosial suatu masyarakat. Pengaturan ekonomi tidak bertindak untuk menjaga kepentingan-kepentingan individual terkait dengan kepemilikan barang-barang. Setiap langkah dalam proses ekonomi

menyesuaikan dengan beberapa kepentingan sosial, yang merupakan dasar bagi tindakan ekonomi.

Dinamika ekonomi masyarakat pedesaan dipengaruhi pula aspek non ekonomi yang berkaitan dengan budaya, politik dan keagamaan. Beberapa aspek non ekonomi mewarnai corak sistem dan praktik berekonomi. Proses ekonomi menjadi tidak bisa lepas dari persoalan-persoalan sosial budaya, politik dan keagamaan masyarakat. Situasi yang kondusif akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Termasuk juga perubahan-perubahan sistemik dalam aspek ekonomi masyarakat. Dinamika sosial ekonomi pedesaan mempengaruhi sistem ekonomi Islam dalam upayanya memasuki dan mengeser sistem perekonomian yang telah mapan. Komposisi sistem kehidupan masyarakat menjadi faktor penting dari dinamika sosial ekonomi di pedesaan

*Kedua*, Lingkungan Biotis dan Infrastruktur yang merupakan keberlangsungan kegiatan ekonomi adalah bagian dari aktifitas yang berlangsung dalam masyarakat; dalam proses pengembangan tersebut maka aspek lingkungan biotis dan infrastruktur merupakan bagian dari yang harus terpenuhi dalam pembangunan desa mandiri.

Adapun infrastruktur merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai atau yang dapat menunjang terselenggaranya proses pengembangan desa mandiri berbasis ekonomi syariah. Tanpa adanya infrastruktur yang mampu dimanfaatkan dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi maka akan sulit diwujudkan suatu program kegiatan. Infrastruktur menjadi prioritas pembangunan secara nasional. Dalam melakukan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur berdasarkan teori Grigg sistem infrastruktur merupakan pendukung utama sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dalam pembangunan infrastruktur desa merupakan suatu proses pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana yang dimiliki. Dalam pembangunan perlu adanya tahap perencanaan, secara garis besar perencanaan tersebut meliputi analisis kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan. Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumber daya manusia setempat.

Apabila dampak pembangunan tersebut

memberikan dampak perekonomian yang meningkat maka pembangunan tersebut mampu mewujudkan kesejahteraan, dalam ekonomi Islam kesejahteraan merupakan adanya rasa aman baik dari segi perasaan, lingkungan dan juga materi. Islam memandang kesejahteraan yang diperoleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan merupakan balas jasa atas usaha yang dilakukan.

*Ketiga*, aspek kelembagaan masyarakat yang merujuk pada buku yang dikeluarkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang desa mandiri, desa membangun menggambarkan strategi dalam membangun kemandirian desa. Dalam proses membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis, dalam proses ini biasanya akan dipengaruhi oleh faktor eksternal yang mengancam hak publik. Meski demikian, keduanya adalah modal penting bagi desa untuk membangun kedaulatan dan titik awal terciptanya komunitas warga desa yang nantinya akan menjadi kekuatan penyeimbang atas munculnya kebijakan publik yang tidak responsif masyarakat.

Pelibatan organisasi kemasyarakatan desa dalam proses-proses pengambilan kebijakan publik yang diselenggarakan pemerintah desa guna membangun kesadaran bersama sebagai entitas, desa tidak hanya terdiri dari pemerintah desa, tapi ada element masyarakat yang salah satunya terwakili melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Di samping itu salah satu salah satu yang menjamin peran dinamis organisasi masyarakat sipil di desa adalah pelibatan mereka ke dalam arena perumusan dan pengambilan kebijakan desa. Melalui cara ini, secara tidak langsung pemerintah desa telah mengedepankan prinsip penghormatan, partisipasi dan emansipasi warga dalam pembangunan. Dari sinilah nanti akan lahir proses *chek and balances* dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

*Keempat*, potensi ekonomi dalam pengembangan desa mandiri berbasis ekonomi syariah merupakan bagian yang menjadi kekuatan dalam perjalanan pengembangannya. Kita dapat melihat bagaimana potensi pertanian, industri, dan potensi wisata yang ada pada desa tersebut. Pada fokus penelitian tentang Pengembangan Desa Mandiri Berbasis Ekonomi Syariah maka perlu adanya keberlangsungan kegiatan di bidang ekonomi syariah yakni:

- a. Keuangan Syariah
- b. Wisata Religi
- c. Industri (Fashion Islami)

*Kelima*, akses keuangan sebagai pilar yang menjadi acuan sangat mendasar, sebab akses merupakan bagian dari ukuran kegiatan ekonomi masyarakat tersebut. Sebagai acuan penilaian desa mandiri berbasis ekonomi syariah maka kita harus melihat sejauh mana masyarakat telah melakukan transaksi/aktifitas yang sesuai prinsip syariaiah. Adanya lembaga keuangan syariah seperti bank maupun non bank menjadi pendukung dalam mengukur akses keuangan masyarakat desa. Berangkat dari misi Pengembangan Desa Berbasis Ekonomi Syariah yang merupakan bentuk dari semangat membumikan al-Qur'an pada aspek kegiatan muamalah yang berdasarkan prinsip syariah, maka potensi ekonomi ini menjadi penting sebagai indikator subjek dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Tentu saja dalam melakukan penilaian terhadap potensi ekonomi tidak hanya persoalan yang sifatnya duniawi, tetapi juga nilai-nilai aplikatif dari *Hablum minallah* yang berbanding positif dengan *Hablum minannas*. Sehingga ukuran kualitas dan kuantitas potensi ekonomi adalah ketika mampu menyelaraskan antara tauhid Ilahiah dengan tauhid sosialnya, yang mana keduanya bermuara pada pencarian ridaNya.

Program Pengembangan Desa Mandiri Berbasis Ekonomi Syariah merupakan program pemberdayaan serta pengembangan desa yang digagas oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur bekerja sama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Jawa Timur. Dalam prosesnya telah dirumuskan indikator/pilar penilaian pemilihan desa yang diajukan sebagai *pilot project*. Ada 5 pilar/indikator yang telah ditetapkan dan indikator.

Berangkat dari misi Pengembangan Desa Berbasis Ekonomi Syariah yang merupakan bentuk dari semangat membumikan al-Qur'an pada aspek kegiatan muamalah yang berdasarkan prinsip syariah, maka potensi ekonomi ini menjadi penting sebagai indikator subjek dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Tentu saja dalam melakukan penilaian terhadap potensi ekonomi tidak hanya persoalan yang sifatnya duniawi, tetapi juga nilai-nilai aplikatif dari *Hablum minallah* yang berbanding positif dengan *Hablum*

*minannas*. Sehingga ukuran kualitas dan kuantitas potensi ekonomi adalah ketika mampu menyelaraskan antara tauhid Ilahiah dengan tauhid sosialnya, yang mana keduanya bermuara pada pencarian ridaNya.

Pada sektor pariwisata yang merupakan salah satu pemompa kemajuan ekonomi suatu daerah selain kemajuan dalam bidang bisnis dan perbankan. Pariwisata tentu sangatlah penting bagi ekonomi sebuah daerah karena keberadaannya menambah lahan bisnis bagi masyarakat sekitar. Bisnis tersebut akan semakin beragam menyesuaikan kondisi dan kebutuhan tempat wisata tersebut. Sepertihalnya cindramata, penginapan, tempat kuliner, transportasi, dan jasa lain yang mendukung fasilitas wisata yang ada. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam mengatur setiap aktifitas yang dilakukan terlebih dalam bidang ekonomi (muamalah), jadi sektor wisatapun menjadi lahan bisnis yang telah diatur batasan-batasannya oleh Islam. Hal tersebut disebabkan pengaruh pariwisata terhadap kehidupan ekonomi, budaya dan sosial bahkan pada aspek keberagaman.

Desa Syariah Cukir memiliki potensi wisata religi<sup>1</sup> atau sejarah yakni makam mantan Presiden RI KH. Abdurrahman Wahid di Pondok Pesantren Tebuireng, Desa Syariah Cukir, Kab. Jombang, Jawa Timur. Jumlah pengunjung dari tahun ke tahun semakin banyak, jumlah pengunjung setiap hari sudah di atas 3.000 orang peziarah yang datang, dan meningkat pada setiap Sabtu dan Minggu, mereka datang dari berbagai daerah di Jawa Timur bahkan daerah di Indonesia yang datang menggunakan mobil atau rombongan dengan Bus terkadang mereka yang datang adalah rombongan wisata religi wali-wali.

Di makam pesantren Tebuireng selain ada makam KH. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, juga ada makan pendiri Organisasi Islam terbesar di Indonesia (Nahdlatul

<sup>1</sup>Wisata religi merupakan salah satu jenis produk wisata yang berkaitan erat dengan religi atau keagamaan yang dianut oleh manusia. Wisata religi dimaknai sebagai kegiatan wisata ketempat yang memiliki makna khusus bagi umat beragama, biasanya berupa tempat ibadah, makam ulama, atau situs-situs kuno yang memiliki kelebihan (sisi sejarah, adanya mitos atau legenda, keunikan dan keunggulan pada bidang arsitektur bangunan)

Ulama) yakni KH. Hasyim Asy'ari, serta ayahandanya yang juga tokoh nasional KH. Wahid Hasyim. Selain itu, sejumlah Kiai dan keluarga juga dimakamkan di lokasi tersebut.

Dengan adanya tempat tersebut maka dapat mendukung roda perekonomian warga setempat maupun pesantren bahkan Desa meningkat dengan memanfaatkan fasilitas pusat kuliner dan oleh-oleh. Bahkan warga dapat menjual jasa seperti kamar mandi, sebab fasilitas yang ada di pemakaman sangatlah terbatas jika peziarah membludak dimomen-momen khusus seperti pada Maulid Nabi, Isra' dan mi'raj maupun Ramadhan.

Salah satu pedangan mengatakan: *“dengan adanya makam Gus Dur di Tebuireng ini membuat banyak pengunjung berdatangan, sehingga menjadi berkah tersendiri bagi kami untuk mengais rizki dengan berdagang”*. (Wadhi, 2018)

Selain adanya berkah pada bidang ekonomi, adanya pesantren Tebuireng, terlebih lagi setelah adanya makam Presiden ke-empat Indonesia yaitu KH Abdurrahman Wahid yang diletakkan di lingkungan pesantren. Masyarakat juga dapat membangun kehidupannya dengan saling berinteraksi dengan sesama pedagang, pembeli dan pihak pondok pesantren/pengelola.

Pedagang di sekitar makam Gus Dur memiliki sistem perdangan yang cukup baik, karena dengan kesadaran pedangan sendiri maka dibuatlah paguyuban-paguyuban untuk mengatur penjual di sekitar makam Gus Dur untuk menjalankan perekonomian masyarakat yang berbudaya Islami, ada empat paguyuban yang mengatur pedagang di sekitar warga yang meliputi Listrik, Toko-toko penjualan, Kebersihan dan Keamanan.

Perdagangan di sekitar makam Gus Dur juga tidak luput dari pengaruh pondok pesantren karena nilai-nilai atau tradisi di dalam pondok pesantren sangat berpengaruh, seperti bersifat sopan kepada pembeli, mendahulukan kenyamanan pembeli, tidak mengambil keuntungan yang berlebih dalam pekerjaan, pedagang selalu memperhatikan kesejahteraan bersama untuk membangun kehidupan sosial ekonomi.

Pada aspek itulah selain nilai-nilai Islami dalam kegiatan ekonomi diterapkan, hal ini merupakan bagian dari indikator kesejahteraan dalam Islam yang memenuhi sistem nilai Islam,

kekuatan ekonomi perdagangan dan keamanan serta ketertiban sosial. Sehingga aktifitas ekonomi yang berada di kawasan wisata akan mendidik masyarakat untuk mewujudkan desa yang mandiri dengan prinsip-prinsip syariah.

Desa Syariah Cukir yang notabeneanya berada di kawasan Pesantren Tebuireng dan juga berada di kawasan industri pabrik gula peninggalan Belanda sehingga memiliki aktifitas ekonomi yang cenderung tinggi, oleh karena itu kehadiran lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank menjadi oase dalam segala aktifitas yang ada di Desa Syariah Cukir secara keseluruhan. Adanya pasar Cukir yang merupakan pasar Induk di kecamatan Diwek menjadi salah satu potensi perputaran kegiatan ekonomi yang sangat baik. Dalam konteks ini maka masyarakat haruslah mampu dan memiliki akses keuangan yang mendukung dalam segala aspek kegiatan ekonomi tersebut.

Merujuk pada skema konsep akses keuangan yang telah dibuat oleh bapak Taufik Saleh, maka dapat kita gambarkan bagaimana kondisi masyarakat Desa Syariah Cukir dalam menerima kemudahan mengakses keuangan yang sesuai prinsip syariah. Pada salah satu indikator yang menjadi acuan adalah tersedianya akses lembaga keuangan syariah untuk usaha masyarakat. Hal ini merupakan indikator yang sangat menentukan arah karakteristik Desa Mandiri Berbasis Ekonomi Syariah.

Di Desa Syariah Cukir saat ini telah berdiri beberapa lembaga keuangan syariah maupun non syariah, Lembaga Keuangan Bank maupun non Bank, hal ini menjadi sebuah indikator besarnya potensi pasar keuangan di Desa Syariah Cukir. Di antara lembaga keuangan tersebut adalah:

1. BMT Mu'amalah Syariah di Jl. Gerilya No.65 Cukir, Diwek
2. BMT Darul Falah di Jl. Cukir Gang Masjid No. 15 Cukir, Diwek
3. BMT Maslahah di Jl Masjid Gg 1 RT/RW 08/03 Cukir, Diwek

Dari ketiga lembaga keuangan di atas telah kami dapatkan data jumlah nasabah yang ada di Desa Syariah Cukir yakni sebagai berikut:

**Jumlah Nasabah Lembaga Keuangan Syariah**

No	LKS	Jumlah	Nasabah Pembiayaan Usaha
1	BMT Mu'amalah Syariah	740	260
2	Darul Falah	983	252
3	Maslahah	861	256
	<b>Jumlah</b>	<b>2584</b>	<b>768</b>

Dari tiga lembaga keuangan syariah di atas maka dapat kita ketahui rasio partisipasi masyarakat Desa Syariah Cukir untuk mengkases keuangan syariah adalah 1:3 atau 31% dari jumlah penduduk keseluruhan. Mereka yang memanfaatkan lembaga keuangan syariah untuk pembiayaan usaha adalah 1:11 atau 9% dari keseluruhan jumlah penduduk. Jika melihat **gambar 4.6** maka rasio tersebut sudah memenuhi kriteria indikator akses keuangan syariah yang menjadi pilar Pengembangan Desa Mandiri Berbasis Ekonomi Syariah.

Salah satu lembaga keuangan syariah di atas yakni BMT Mu'amalah Syariah memiliki program pengembangan dan membina usaha kecil melalui bantuan modal dan pembinaan usaha, sehingga kegiatan usaha kecil ke bawah dapat berkembang maju dan mandiri, serta mampu mengangkat dan memulihkan perekonomian dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Wujud pembinaan usaha adalah memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada pengusaha kecil, agar mampu untuk mengembangkan kreatifitas yang dimiliki. Selain pada aspek kreatifitas BMT Mu'amalah juga berupaya meningkatkan kualitas SDM, memberikan layanan konsultasi usaha dan motivasi.

**KESIMPULAN / CONCLUSION**

Konsep pengembangan desa mandiri berbasis ekonomi syariah adalah bagian dari aktualisasi prinsip-prinsip syariah kedalam 5 pilar pengembangan desa tersebut, yakni (1) SDM dan Kondisi sosial (2) Lingkungan biotik dan infrastruktur (3) Kelembagaan Masyarakat (4) Kondisi Ekonomi (5) Akses Keuangan. Konsepsi sosial-keagamaan menjadi penguat bahwa perilaku ekonomi kaum Muslim pada hakekatnya adalah manifestasi pengalaman dalam mengaktualisasikan ajaran agama. Oleh karena itu, dalam mencapai suatu kebahagiaan

hidup tidak hanya memperhatikan suatu perhitungan untung dan rugi.

Desa Syariah Cukir memiliki potensi pengembangan desa mandiri berbasis ekonomi syariah, sebagaimana yang telah ada, pada aspek kegiatan ekonomi, Desa Syariah Cukir memiliki wisata religi yang aktifitas perdagangannya telah mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam transaksi maupun dalam interaksi sosialnya. Dalam akses keuangan Desa Syariah Cukir sangatlah mudah mengakses lembaga keuangan syariah yang mampu memberikan permodalan dalam usaha masyarakat sekitar dan beberapa program pemberdayaan desa. Pada kondisi sosial Desa Syariah Cukir yang mayoritas adalah warga beragama Islam dan merupakan kawasan yang didalamnya ada sebuah pesantren yang memiliki nilai historis pada aspek religi dengan pengaruh yang kuat terhadap masyarakat sekitar sehingga nilai-nilai Islam yang ada di dalam pesantren memberikan pengaruh secara tidak langsung kepada masyarakat sekitar melalui interaksi sosial.

## DAFTAR PUSTAKA / BIBLIOGRAPHY

- Anif Punto Utomo. (2014). *Dua Dekade Ekonomi Syariah Menuju Kiblat Ekonomi Islam*. Gress!
- Didik G. Suharto. (2016). *Membangun Kemandirian Desa*. Pustaka Pelajar.
- Intan Mala Sari, & Abdullah, M. F. (2017). Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa Di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15, 35–49.
- J.H. Boeke. (1983). *Pra Kapitalisme Di Asia, Trans. D. Projosiswoyo*. Sinar Harapan.
- Kusmanto, T. Y. (2016). Gerakan Sosial Ekonomi Islam Di Pedesaan: Studi Kasus Peran Baitul Maal Wat Tamwil Di Kabupaten Sragen. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 16(1), 223. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i1.354>
- Latief, H. (2012). *Filantropi Islam dan Aktivism*. 167–187. <https://doi.org/10.18196/AIJIS.2012>.
- M. Sujito (Sekretaris Desa Cukir). (2018). *Wawancara*.
- Nilam Eka Nurcahya. (2018). *Usaha Desa*.
- Nizar, M. (2016). *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang*. 8(1).
- Pemerintah Desa Cukir. (2017). *Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD*.
- Pera Sundarianingsih. (2014). Evaluasi Keberhasilan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Menggerakkan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Pekutatan). *Ekonomi Pembangunan*, 12, 70–75.
- Prihartini Budi Astuti. (2014). Efektifitas dan Pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Daerah dan Jumlah Penduduk terhadap Kepala Keluarga Miskin di Kabupaten Kebumen 2009-2011. *Eko Regional FEB UNSOUED*, 9(2), 89–101.
- Pujumulyatama, A. (2014). Analisis Pengentasan Kemiskinan Dalam Prespektif Peran Gender di Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.12, 1–2. <http://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no=124000>
- Ramly, A. R. (2019). *Analysis Of Village Building Index In Village Development In Kuala Sub-District*. 17(01), 22–31. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jep/article/view/8087/pdf>
- Sofyani, H., Atmaja, R., & Rezki, S. B. (2019). Success Factors of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Performance in Indonesia: An Exploratory Study. *Journal of Accounting and Investment*, 20(2). <https://doi.org/10.18196/jai.2002116>
- Sukmaniar. (2007). *Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca Tsunami di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar*. Universitas Diponegoro.
- Syafar Supardjan. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat pada Program Pembiayaan Mikro (Studi tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Mikro pada Anggota Koperasi Baytul Ikhiar, Kabupaten Bogor)*. Universitas Indonesia.
- Umer Chapra. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi, trans Ikhwan Abidin Basri*. Gema Insani.
- Wadhi. (2018). *wawancara*.
- Zuhirsyan, M. (2018). Membidik Potensi Ekonomi Syariah di Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 319. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.2.2781>

